



**Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Terkait Pemilihan Umum
Kepala Daerah di Kecamatan Selogiri**

***Socialization of Voter Education and Public Participation Regarding Regional Head
Elections in Selogiri District***

**Retno Eko Mardani^{1*}, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani², Aziz Widhi Nugroho³,
Rengga Kusuma Putra⁴, Fathul Hamdani⁵, Bagus Hermanto⁶, Daulat Nathanael
Banjarnahor⁷**

¹Program Studi Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

³Program Studi Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

⁴Program Studi Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

⁶Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

⁷Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia

Korespondensi Penulis: retnoem89@yahoo.com

Article History:

Received: ;

Revised: ;

Accepted: ;

Online Available: ;

Published: ;

Keywords: Voter Education, Public Participation, Regional Head Elections, Political Socialization, Selogiri District.

Abstract. Voter education is an important instrument in realizing a quality and sustainable democracy. Through the process of voter education socialization, it is hoped that the public can understand in depth their rights and obligations in the implementation of elections, as well as encourage active and responsible participation in the democratic process. Citizen participation in democratic social life must be based on adequate knowledge, critical reflection, and awareness of the rights and responsibilities as voters. A good understanding of the effectiveness of voter education socialization can shape a critical, rational, and independent attitude in exercising the right to vote, thereby strengthening the foundations of a clean and integrity-based democracy. This community service was carried out in the Selogiri District, Wonogiri Regency, with the aim of providing political education to the public regarding the importance of participation in the 2024 simultaneous regional head elections. Through a Participatory Action Research (PAR) approach, the community was actively involved as subjects in the activity process, not just as objects receiving information. Community service activities are carried out by integrating outreach into various village events, aimed at attracting residents to attend, interact, and directly discuss local political issues and forms of participation in the regional elections. Through these activities, it is hoped that the community will have a more comprehensive understanding of the importance of their role in determining the direction of regional policy through the regional elections. This education is also expected to raise awareness to vote based on conscience, without intervention or negative influences such as money politics, which has been a major challenge in every election at both the central and regional levels.

Abstrak

Pendidikan pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui proses sosialisasi pendidikan pemilih, diharapkan masyarakat dapat memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan pemilu, serta mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis harus dilandasi oleh pengetahuan yang memadai, refleksi kritis, serta kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Pemahaman yang baik terhadap efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih dapat membentuk sikap kritis, rasional, dan mandiri dalam menggunakan hak pilih, sehingga dapat memperkuat sendi-sendi demokrasi yang bersih dan berintegritas. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan tujuan memberikan edukasi politik kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024. Melalui pendekatan metode Partisipatif atau Participatory Action Research (PAR), masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai subjek dalam proses kegiatan, bukan hanya sebagai objek penerima informasi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mengintegrasikan sosialisasi dalam berbagai event desa, yang bertujuan menarik minat warga untuk hadir, berinteraksi, dan berdiskusi secara langsung mengenai isu-isu politik lokal serta bentuk-bentuk partisipasi dalam Pilkada. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui Pilkada. Edukasi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memilih berdasarkan hati nurani, tanpa intervensi atau pengaruh negatif seperti politik uang (*money politics*), yang selama ini menjadi tantangan utama dalam setiap pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah, Sosialisasi Politik, Kecamatan Selogiri.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau disebut sebagai Pemilu merupakan rangkaian pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemilu memiliki arti penting bagi negara dikarenakan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sarana bagi para pemimpin politik mendapatkan legitimasi, sarana bagi Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses politik negara, dan merupakan metode peralihan pemimpin yang konstitusional. (Davi et al., 2024)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Penyelenggara Pemilu yang juga mempunyai fungsi untuk memberikan sosialisasi terhadap Pemilih serta kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat dimana tertuang dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai negara Demokrasi tentu diperlukan pemimpin yang dapat memimpin jalannya roda pemerintahan, sesuai dengan UUD 1945 dimana saat berakhirnya jabatan suatu pemerintahan maka kembali dilaksanakan pemilihan umum untuk mengisi kekosongan pemerintahan karena telah habis masa jabatan.

Walaupun Indonesia sudah sejak lama menjalankan sistem pemilu dalam memilih kepala pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu mengalami permasalahan baik teknis maupun prosesnya. Salah satu permasalahannya adalah terkait Partisipasi Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya dalam partisipasi politik sehingga yang terjadi Masyarakat hanya menjadi pemilih yang memang tidak mendasarkan pilihannya sesuai dengan pemahaman akan tetapi hanya ikut-ikutan dan terkadang terkesan acuh untuk sekedar datang ke TPS untuk memberikan pilihannya. Sebagai warga negara yang menganut system pemerintahan negara demokrasi, sepatutnya kita paham mengenai dasar-dasar ilmu politik yang sangat dibutuhkan sebagai warga negara. Masyarakat sebagai warga negara yang baik maka sudah sepatutnya turut andil memberikan suaranya untuk menentukan siapa kepala daerah selanjutnya yang akan berperan penting untuk kemajuan di setiap daerahnya.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan sesuatu yang substansial, karena salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pimpinan negara, yang secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.(Suci pratiwi & Arfa'i, 2021)

Peran dan fungsi penyelenggara pemilu termasuk di dalamnya komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat, sangat dibutuhkan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun harus disertakan dengan aktivitas komunikasi politik yang massif, sampai terbangunnya kesadaran pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Peningkatan partisipasi politik Masyarakat pada hari pemungutan tidak dapat hanya dibebankan kepada KPU, namun semua stakeholder harus terlibat. Oleh karenanya, KPU di semua tingkatan harus mampu membangun sinergitas dengan penyelenggara lain, peserta pemilu dan Masyarakat pemilih di Tingkat paling bawah.(Fathurrijal et al., 2024)

Masyarakat dapat berpartisipasi secara politik dengan berperan sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pemilih adalah WNI yang sudah genah berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilihan umum, pemilih dibedakan menjadi 3 kategori, diantaranya: Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT); Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke

TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan; dan yang terakhir Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Walau hanya ikut berperan sebagai pemilih, tidak serta merta kita sebagai masyarakat lalai akan aturan yang mengatur hak suara pemilih dalam pemilihan umum. Sebagai seorang pemilih kita harus bijak dalam menentukan pilihan, karena kedepannya siapapun yang terpilih niscaya kita akan dipimpin hingga masa jabatannya berakhir. Jadi, sebagai masyarakat harus cerdas dalam memberikan legitimasi terhadap kandidat, jangan sampai masyarakat termakan oleh janji-janji manisnya saja, namun masyarakat harus pula memiliki dasar pengetahuan politik. (Syafrudin et al., 2024)

Tapi pada kenyataannya Masyarakat belum sepenuhnya memahami arti pentingnya memberikan suaranya dalam pemilu. Beberapa masyarakat masih banyak yang hanya ikut-ikutan memilih tanpa mempunyai dasar untuk memberikan suaranya, sehingga marak praktik *Money Politic* untuk menggoyahkan pilihan pemilih. Harapannya sosialisasi ini dapat menekan praktik *Money Politic* sehingga masyarakat bisa memberikan pilihannya secara terbuka tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2. METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode Partisipatif aktif Masyarakat. Karena dalam hal ini Masyarakat sebagai subjek aktif untuk diberikan pemahaman dan pengetahuan kaitannya dengan pemilih dalam pemilihan umum. Kegiatan yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan beberapa event atau bekerjasama dengan kegiatan desa kemudian memberikan sosialisasi beserta mengadakan diskusi interaktif sehingga Masyarakat bisa memberikan pendapatnya terhadap kendala atau kondisi yang dihadapi kaitannya dengan pemilihan umum. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam memerangi praktik *Money Politic* serta membantu untuk memberikan himbauan kepada Masyarakat lainnya betapa pentingnya suaranya untuk kelangsungan kebijakan dalam suatu daerah pemilihan.

Program pengabdian kepada Masyarakat ini sangat baik dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat di Kecamatan Selogiri yang mana bayaknya pemilih pemula sehingga pengetahuan ini sangatlah penting bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Harapannya kegiatan ini bisa terselenggara secara *continue* pra pemilihan umum.

3. HASIL

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan penting di setiap desa di Kecamatan Selogiri.

- a. Acara Jalan Sehat dalam Rangka HUT PKU Muhammadiyah ke-23 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 bertempat di lapangan parkir RS PKU Muhammadiyah Selogiri. Dalam kegiatan tersebut turut hadir forkompincam beserta Masyarakat umum sekitar. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tatap muka dan sosialisasi kepada Masyarakat terkait dengan tata cara pelaksanaan pilkada serentak dan himbauan terhadap Praktik *Money Politic*.
- b. Pelaksanaan sosialisasi di Tingkat Desa di Kecamatan Selogiri bekerjasama dengan Anggota PPS.
- c. Pelaksanaan Jalan Sehat Kebangsaan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 bertempat di Lapangan Pule dengan dihadiri Bupati, Forkompincam dan Kepala Desa serta Masyarakat luas hampir seribu peserta.
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai bentuk informasi visual yang harapannya Masyarakat bisa lebih paham terhadap visi, misi dan program calon kepala daerah yang akan dipilih.
- e. Hari Minggu tanggal 24 September 2024 bertempat di halaman Desa Sendangijo dikemas dalam tajuk Pasar Kaget dan Senam Bersama Masyarakat sekitar.
- f. Hari Minggu tanggal 24 September 2024 bertempat di halaman Desa Sendangijo dikemas dalam tajuk Pasar Kaget dan Senam Bersama Masyarakat sekitar.

4. DISKUSI

Gambar 1. Jalan Sehat dalam Rangka HUT PKU Muhammadiyah ke-23





Gambar 2. Desa Singodutan



Gambar 3. Desa Pule



Gambar 4. Desa Nambangan



Gambar 5. Kelurahan Kaliancar

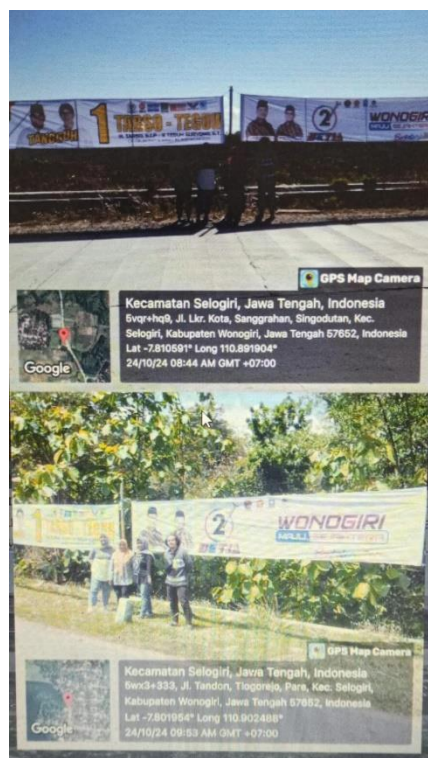


Gambar 6. Foto Pelaksanaan Jalan Sehat Kebangsaan, Minggu/1-9/2024





Gambar 7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai bentuk Informasi Visual visi, misi dan program calon kepala daerah yang akan dipilih.



Gambar 8. Foto Pasar Kaget dan Senam Bersama Masyarakat Sekitar



Gambar 9. Foto *Sharing Session* dengan Ibu-Ibu PKK dalam semangat menolak politik uang



5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan yang telah dipaparkan dipembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap Pendidikan pemilih terutama untuk pemilih pemula sangat perlu dilaksanakan sosialisasi karena tidak banyak mereka yang mengetahui paham betul terhadap bagaimana cara memberikan suaranya di TPS dengan baik dan benar. Kemudian untuk terus mengingatkan kembali terhadap hal-hal yang perlu dipahami kepada Masyarakat kaitannya dengan hal buruk yang pastinya sering terjadi pra pemilu sebagai contoh praktik *Money Politic*, serangan fajar, isu sara dan keagamaan serta Jargon ”Jangan Golput” harus terus disosialisasikan agar pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Dapat terpilih pemimpin

daerah yang sesuai dengan pilihan rakyat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Kemudian untuk menarik peran partisipasi aktif Masyarakat dalam pemilihan umum juga harus selalu diserukan dengan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menginformasikan pentingnya memberikan suara dalam pemilihan umum.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya mengucapkan terimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri yang telah menerima kami dalam memproses kegiatan ini, pimpinan Univet Bantara yang selalu mensupport kegiatan kami dan rekan rekan PPK Kecamatan dan PPS Kec. Selogiri.

DAFTAR REFERENSI

- Afrianto, D. (2019). Dinamika partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada langsung. *Jurnal Politica*, 10(1), 34–45.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davi, N. K., Satria, K., Putra, W., Ngurah, I. G., Ariwangsa, O., Hukum, P. S., Nasional, U. P., ... & Davi, N. K. (2024). Upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula Pemilu 2024 melalui sosialisasi surat suara di SMA PGRI 2 Denpasar (pp. 22–27).
- Fathurrijal, F., Ishanan, I., Yusron, Y., & Suhadah, S. (2024). Strategi komunikasi politik KPUD Lombok Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 7(2), 179–196. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.26272>
- Hidayat, R. (2020). Pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–56.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. (2020). *Laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2020*. Wonogiri: KPU Wonogiri.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum*. Jakarta: KPU RI.
- Mahendra, A. (2023). Pendidikan politik dan partisipasi pemilih muda dalam Pilkada. *Jurnal Civic Education*, 4(2), 101–113.
- Nugroho, H. A. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi pemilu oleh KPU. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), 67–75.
- Nuraini, I. (2021). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 115–128.

<https://doi.org/10.1234/jip.2021.06205>

- Prasetyo, B. (2023). Peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilu. *Jurnal Kajian Sosial Politik*, 7(3), 154–166.
- Putra, A. R. (2019). Peran lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(3), 357–368.
- Rahmawati, D. (2022). Sosialisasi pemilu dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 5(2), 143–156.
- Sari, M. P., & Wijaya, T. (2021). Tantangan sosialisasi pemilu di daerah rural. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 88–99.
- Suci Pratiwi, C., & Arfa'i, A. (2021). Pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai motor generasi muda dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik. *RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 145–152. <https://doi.org/10.51179/pkm.v4i3.815>
- Sulastri, N., & Haris, A. (2022). Efektivitas sosialisasi pemilu terhadap kesadaran politik pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi Politik*, 3(1), 22–33.
- Susanto, E. (2021). Partisipasi politik dalam perspektif demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 210–221.
- Syafrudin, I., Sumadi, T., Afrimetty Timoera, D., Lutfiah Hawany, M., Melijar Rahmadanti, N., & Universitas Negeri Jakarta. (2024). Sosialisasi partisipasi politik masyarakat Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum 2024. <https://doi.org/10.52593/svs.04.1.02>
- Wahyuni, S. (2020). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Demokrasi*, 9(1), 78–88.